



### IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 TERHADAP UMKM DI KELURAHAN SUKARESMI KOTA BOGOR

Riyan Ferandi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

[riyanferandibjb@gmail.com](mailto:riyanferandibjb@gmail.com)

#### Abstrak

Tahun 2020 ini umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri Pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mngindahkan himbauan ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa masyarakat memunculkan perilaku tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Hasil menunjukkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan Pemerintah didasari oleh bias kognisi. Selain menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif analisis.

**Kata kunci:** Covid-19; Wabah; Infeksi; Pemerintah.

#### PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO Semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus tersebut. Hal ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II Oleh karena event-event skala besar (misalnya saja pertandingan-pertandingan olahraga internasional) hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yangtelah sembuh sebanyak 83.313 orang. Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari.

Langkah-langkah dan upaya untuk menangani masalah ini pun telah dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak berkuliah atau bersekolah atau pun memberlakukan bekerja di dalam rumah, namun kondisi ini malahan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur.

Selain itu, walaupun Indonesia sudah dalam keadaan darurat masih saja akan dilaksanakan tabligh akbar, dimana akan berkumpul ribuan orang di satu tempat, yang jelas dapat menjadi mediator terbaik bagi penyebaran virus corona dalam skala yang jauh lebih besar. Perilaku yang tidak normal yang ditunjukkan oleh fenomena diatas memicu peneliti untuk menganalisa lebih jauh secara psikologi mengapa hal tersebut dapat terjadi di saat kondisi negara sedang dalam keadaan bencana dan bagaimana cara mengatasinya terkait implementasi Peraturan Walikota Bogor No. 107 Tahun 2020. Khususnya pada UMKM di sekitar Sukaresmi Bogor. Selain itu peneliti juga akan memaparkan kiat-kiat dalam menjaga kesejahteraan jiwa dalam menghadapi wabah corona ini melalui pendekatan psikologi positif, kemudian perumusan masalah adalah “Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2020 terhadap UMKM Kelurahan Sukaresmi Bogor?”

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan data berdasarkan interview (wawancara), kuesioner dan observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan menteri kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.



Gambar 1. Proses Observasi



Gambar 2. Proses Wawancara

Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan pakai masker serta harus sering mencuci tangan setelah melakukan aktivitas menjadi kewajiban bagi warga yang berpergian keluar rumah. Terkait dengan ini peneliti meneliti masyarakat UMKM RT 03 RW 04 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor berkaitan dengan protokol kesehatan serta pendapat mereka tentang protokol kesehatan yang telah di berlakukan, akibat dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini. Tentu saja ini sangat merugikan kegiatan usaha warga tersebut terutama bagi kaum suami yang akhirnya banyak digugat cerai oleh istrinya meskipun tidak semua warga seperti itu, karena usaha mmereka merugi. Tetapi sepanjang diberlakukan Peraturan Walikota No. 107 Tahun 2020 ini, warga setempat tetap berusaha untuk menaatinya.

## **KESIMPULAN**

Pemahaman kesadaran warga di lingkungan RT 03 RW 04 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor akan bahayanya covid-19 dan melakukan pencegahan sesuai dengan protokol kesehatan yang di berlakukan seperti peraturan Wali Kota Bogor No.107 tahun 2020, bahwa untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam tertib kesehatan, telah didukung dan dipatuhi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dengan adanya kesadaran dari warga maka penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan dan dijalankan untuk mencegah dan menekan penyebaran covid-19 di Indonesia yang saat ini masih tinggi dari tingkat terinfeksi nya tiap masyarakat indonesia dan semoga kesadaran warga dapat di implementasikan di daerah atau wilayah lain agar cepatnya Indonesia terbebas dari wabah yang sangat membahayakan hingga berdampak

pada kehidupan kita baik dari ekonomi, sosial maupun budaya.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Sulaeman, *Politik Hukum Bencana di Indonesia*, Syiah Kuala University Press, 2020.

Peraturan menteri kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020.

Peraturan Walikota Bogor No. 107 Tahun 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Firdaus ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

[http://jdih.bogorkab.go.id/produk\\_hukum/pemkab](http://jdih.bogorkab.go.id/produk_hukum/pemkab): peraturan bupati bogor No.42 tahun 2020.

<https://www.researchgate.net/publication/340103659> Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona Covid19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan 10477-Article

Text-31455-1-10-20200622-hukum pidana pengarang zuleha th 2017 penerbit Deepublish